

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN MENGENAI FASILITAS PEJALAN KAKI
DI KOTA PEKANBARU
TAHUN 2013**

**Oleh :
Era Elfiandi
Email : eraelfiandi@yahoo.co.id
Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan– Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Population growth and high population densities caused providing pedestrian of transportation such as people crossing bridge, have started in several locations of congested traffic. People crossing bridge is intended to facilitate the pedestrians to cross the road in comfort and safety.

This is a descriptive study using a qualitative approach as a tool of analysis. The research was conducted at Pekanbaru, with a focus of research on the implementation of policies regarding pedestrian facilities such as people crossing bridge in Pekanbaru and factors that affecting the implementation of policies about people crossing bridge didn't maximal which used the theory by Edward III. Techniques of data collection were interviews, observation and documentation.

After research, the authors conclude that implementation of policies about people crossing bridges didn't maximal because the existence of a people crossing bridges was rarely used and often miss functioned. The affecting factors of didn't maximal is less effective communication, the limited available resources, the attitude of implementator. The factors that most influence implementation of policies about people crossing bridges are resource constraints such as budget or funds that have not been owned by the Pekanbaru government and there isn't punishment to the existence of people crossing bridges that violates the rules and functioned incorrectly.

Keyword : *Implementation, PeopleCrossingBridge, Policy.*

Pendahuluan

Perkembangan menuntut penciptaan fasilitas perumusan dan bagaimana melengkapi sarana-sarana dan fasilitas untuk melayani warganya secara memuaskan yaitu mulai dari perkantoran, prasarana lalu lintas, transportasi dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuhan yang menndesak untuk melayani masyarakat pada masa silam, tidak selalu sama dengan kebutuhan-kebutuhan pada zaman sekarang dan mungkin tidak akan sama pula kebutuhan di masa mendatang. Kebijakan yang dibuat sangat dibutuhkan dan memiliki pengaruh yang besar dalam melihat kebijakan politik yang diambil para politisi ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Dalam permasalahan yang ada di Kota Pekanbaru, keberadaan fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang yang sangat membantu masyarakat, apalagi dalam kondisi semakin padatnya arus lalu lintas dan kemacetan.

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Bab XVI, Bagian Kesatuyaitu Fasilitas Pejalan Kaki Pasal 131 ayat 1, jenis fasilitas pejalan kaki yang berupa trotoar, zebra cross dan jembatan penyeberangan orang. Pasal 131 ayat 2 berbunyi, Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru. Pasal 132 ayat 1 berbunyi, Pembangunan jembatan penyeberangan orang dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Jumlah Jembatan Penyeberangan Orang di Kota Pekanbaru Tahun 2013

N o	Lokasi	Kecamatan	Jumlah
1	Jalan Jenderal Sudirman	Pekanbaru Kota	2
2	Jalan Jenderal Sudirman	Bukit Raya	4
3	Jalan HR. Soebrantas	Tampan	2
4	Jalan Soekarna-Hatta	Tampan	1
5	Jalan Tuanku Tambusai	Sukajadi	2
Total			11

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru Tahun 2013

Tercatat terdapat 11 jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru. Perencanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) kemudian perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru dan pembangunan dilakukan oleh pihak ketiga (non-pemerintah). Namun, kurangnya dilakukan analisis yang mendalam terdapat masalah-masalah berkaitan dengan situasi dan khalayak sangat mempengaruhi keberhasilan perencanaan dan implementasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Setelah adanya keberadaan jembatan penyeberangan orang, berbagai permasalahan muncul yang berkaitan dengan kondisi dan lokasi jembatan penyeberang orang yang kurang

bermanfaat dan kurang tepat sasaran seperti :

1. Sejumlah jembatan penyeberangan orang yang terlihat kurang terawat didalam pemeliharannya terlihat dari kondisinya seperti yang terletak di lokasi salah satu jalan Jenderal Sudirman di jalan Tuanku Tambusai.
2. Sejumlah jembatan penyeberangan seperti di Jalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Soekarno-Hatta, HR. Soebrantas tidak berfungsi termasuk pada jam sibuk lalu lintas kendaraan padat.
3. Sejumlah jembatan penyeberangan di ruas protokol seperti Jalan Sudirman, Soekarno-Hatta, HR. Soebrantas hanya digunakan untuk memasang iklan. Sedangkan warga yang menyeberang melalui jembatan itu relative sedikit karena letaknya tidak strategis.
4. Sejumlah jembatan penyeberangan orang di Jalan Sudirman dan Tuanku Tambusai dijadikan sebagai tempat berjualan bagi pedagang.
5. Bahkan sebagiannya lagi, yaitu jembatan penyeberangan orang yang terletak di salah satu jalan HR. Soebrantas berdiri tegap tersebut sama sekali tidak berfungsi karena tidak memiliki tangga naik-turun.

Adapun ketentuan atau aturan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, Fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang dibutuhkan pada:

1. Daerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah penduduknya tinggi.
2. Jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap.
3. Daerah-daerah yang memiliki aktifitas kontinyu yang tinggi,

seperti misalnya jalan-jalan pasar dan perkotaan.

4. Lokasi-lokasi yang memiliki kebutuhan dan permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, seperti misalnya sekolah, rumah sakit, dan antar pasar.

Hanya saja sangat disayangkan pembangunan fasilitas pejalan kakiberupa jembatan penyeberangan orang tersebut banyak yang sia-sia. Meski dibangun oleh pihak ketiga (non-pemerintah) namun tidak banyak membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Lebih lanjut disebutkan, pembangunan fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang oleh pihak ketiga ini semata-mata merupakan topeng para investor untuk memasang reklame. Jadi, di fasilitas pejalan kaki jembatan penyeberangan orang tersebut mereka memperagakan iklan reklamenya.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus masalah yang menjadi pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru?
2. Mengapa pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru kurang maksimal?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan

penyeberangan orang di Kota Pekanbaru kurang maksimal.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Adapun kegunaan penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan terutama studi implementasi kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang yang cenderung bersifat kompleks dan sulit dipahami.
2. Secara praktis
 - a. Bagi pemerintah, memberi informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki di Kota Pekanbaru Tahun 2013.
 - b. Bagi mahasiswa, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai tentang pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki di Kota Pekanbaru Tahun 2013.
 - c. Bagi masyarakat, dapat menginformasikan hasil-hasil penelitian ini kepada masyarakat luas sehingga pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki di Kota Pekanbaru Tahun 2013 benar-benar mendapat dukungan dari masyarakat luas.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan

secara sistematis, aktual dan akurat terhadap subjek atau objek keseluruhan penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti memilih para narasumber yang dapat memberikan data mengenai pelaksanaan dalam kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki di Kota Pekanbaru tahun 2013. Narasumber tersebut didapat melalui teknik *purposive sampling* dengan informan berjumlah 9 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara mengenai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan kurang maksimal, keterlibatan antar instansi didalam pelaksanaan kebijakan, kejelasan produk hukum untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan. Dan data sekunder dalam penelitian ini berupa data lain yang relevan seperti Peraturan Perundang-undangan dan jumlah fasilitas pejalan kaki.

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki di kota Pekanbaru tahun 2013

Seperti halnya di Kota Pekanbaru dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, penyediaan sarana transportasi bagi pejalan kaki seperti jembatan penyeberangan orang sudah mulai disediakan di beberapa titik lokasi padat lalu lintas. Penyediaan Jembatan Penyeberangan Orang dimaksudkan untuk mempermudah pejalan kaki untuk menyeberang jalan dengan nyaman dan aman. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan jembatan penyeberangan orang tersebut dirasakan kurang berjalan dengan baik dalam

memecahkan permasalahan sirkulasi antara pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan kendaraan . Hal ini bisa dilihat pada kenyataannya bahwa jembatan penyeberangan sebagai salah satu fasilitas penyeberangan jarang dipakai dan terkadang sering disalah fungsikan.

Merujuk pada model implementasi yang dikemukakan oleh Geogre C. Edward III dalam Agustino (2008 :148) dimana terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Agar kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru dapat terlaksana dengan baik, maka harus dilaksanakan sosialisasi kepada pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan kebijakan ini dalam bentuk koordinasi antar sektor dan sosialisasi juga harus dilakukan kepada masyarakat.

Adapun tiga hal yang penting dalam proses komunikasi kebijakan yang telah disebutkan diatas, yaitu :

a. Transmisi

Transmisi adalah faktor utama dalam komunikasi, karena sebelum kebijakan dilaksanakan, para pelaksana kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan. Dalam hal ini dimaksud ialah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Bab XVI Bagian Kesatu yaitu Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Pekanbaru. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implemntasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian

(miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Sementara itu berkaitan dengan pembangunan jembatan penyeberangan orang dilakukan dengan berkerja sama oleh pihak ketiga (swasta) hal ini dilakukan agar pembangunan jembatan penyeberangan orang agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar.

b. Kejelasan Regulasi

Hal ini penting, agar para implementator dapat mengetahui dengan jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai implementasi kebijakan atau program dan juga mengetahui dengan jelas dan tegas mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan. Ketentuan atau aturan untuk implementator suatu kebijakan harus disampaikan pada orang yang tepat, jelas akurat, dan konsisten terhadap ketentuan atau aturan tertentu. Jika tidak, akan terjadi salah pengertian diantara implementator dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jelasnya, kebingungan para pelaksana akan member peluang yang besar bagi terjadinya implementasi kebijakan yang tidak sesuai ketentuan yang dikehendaki. Demikian juga para pembuat kebijakan, dalam mengamankan kebijakan kepada pelaksana tidak hanya sekedar melalui petunjuk atau perintah semata, akan tetapi harus melakukan komunikasi dengan para pelaksana kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang yang diterapkan selama ini belum

maksimal, karena ternyata masih ada saja fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang tidak berfungsi dan disalahfungsikan.

Tabel Jembatan Penyeberangan Orang yang Kurang Berfungsi di Kota Pekanbaru Tahun 2013

No	Lokasi	Uraian	Kondisi
1	Jalan Jenderal Sudirman	Depan Modelux	Tempat pemasangan iklan reklame
		Depan Gedung DPRD Provinsi	Sangat sepi yang menyeberang, jarang dipergunakan bagi pejalan kaki
		Depan Sudirman City Square	Sangat sepi yang menyeberang, jarang dipergunakan bagi pejalan kaki
		Depan Hotel Ratu Mayang Garden	Jarang dipergunakan bagi pejalan kaki untuk menyeberang
		Depan Gelanggang Remaja	Kurang bermanfaat, dipergunakan pemasangan iklan reklame
2	Jalan Soekarno-Hatta	Simpang SKA Mall	Kurang bermanfaat, tempat pemasangan iklan reklame

3	Jalan Soebrantas	Lampu Merah Simpang 3 Panam	Kurang bermanfaat, tempat pemasangan iklan reklame
		Depan Giant	Tidak memiliki tangga naik dan turun, tempat pemasangan iklan reklame

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2013

c. Konsistensi

Persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang maksimal adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan dan dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika sudah semaksimal mungkin melaksanakan sesuai dengan arahan dan aturan yang ada namun didalam pelaksanaannya belum konsisten dengan keadaan yang ada terjadi dilapangan, terkait dengan keberadaan jembatan penyeberangan orang yang tidak sesuai dengan penempatan dan fungsinya.

2. Sumber Daya

Sumber daya menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melakukan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Segala bentuk keputusan yang dibuat harus dengan kajian yang matang, jika tidak maka persoalan-persoalan bisa muncul akibat keberadaan jembatan penyeberangan orang yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kemampuan sumber daya implementator dalam melakukan kajian-kajian sebelum pelaksanaan program atau kebijakan harus dilakukan. Tentunya program atau Kebijakan ini harus mencapai tujuan yang optimal. Selain sumber daya manusia, sumber daya pendukung lainnya juga berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang, sumber daya tersebut berupa sumber daya finansial atau anggaran untuk membangun fasilitas infrastruktur jembatan penyeberangan orang. Dalam pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang yang memiliki anggaran atau dana dimiliki sepenuhnya oleh pihak ketiga yaitu perusahaan swasta yang berada di Kota Pekanbaru yang berkerja sama oleh Pemerintah Kota .

3. Disposisi

Disposisi menyangkut kesiapan dan kesediaan dari para implementator dalam menyelesaikan kebijakan, kecakapan, pelaksanaan tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Dukungan pelaksana mentaati program atau aturan yang berlaku merupakan penunjang keberhasilan suatu program atau kebijakan. Kesediaan aparat pelaksana untuk mentaati prosedur yang sudah ditetapkan sesuai petunjuk teknis yang baik, maka kebijakan dapat dijalankan dengan baik seperti apa yang diinginkan

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Namun, kenyataannya keberadaan jembatan penyeberangan orang lebih banyak yang tidak berfungsi sebagai mestinya. Seharusnya dapat memperhatikan kebutuhan yang ada, karena dalam pelaksanaannya banyak terdapat masalah terkait dengan keberadaan jembatan penyeberangan orang yang ternyata kurang fungsinya dan yang menonjol justru aspek komersialnya.

Dari tahun ke tahun penyediaan fasilitas pejalan kaki telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Sikap pelaksana dalam menaati aturan guna melaksanakan kebijakan harus dilaksanakan benar – benar terimplementasikan. Kurang tanggap dari pelaksana dalam mensiasati fenomena mengenai jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru membuat kebijakan tidak berjalan. Sehingga ini merupakan celah terjadinya masalah dan tidak terlaksana dengan baik, karena sikap pelaksana tersebut lah yang mendukung berhasil tidaknya implementasi kebijakan itu sendiri.

Sikap dari pelaksana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru ini bentuk komitmen dan daya tanggap pihak ketiga perusahaan swasta dalam pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang melalui tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan yang melekat pada Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika ini.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi

yang menjadi penyelenggara kebijakan. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi keterlambatan dan kesalahan birokrasi dalam melakukan kebijakan.

Penyelenggaraan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang dalam hal ini inas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebannya. Organisasi birokrasi tersebut dilibatkan dalam penyelenggaraan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru dilakukan sesuai dengan yang telah diatur.

Pengorganisasian kegiatan pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, pengelolaan kegiatan tersebut seharusnya dapat dilakukan atau didukung oleh instansi-instansi yang dapat berkerja sama.

B. Faktor – faktor yang Mempengaruhi pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki kurang maksimal di kota Pekanbaru Tahun 2013.

1. Komunikasi yang Kurang Efektif

Komunikasi adalah faktor yang sangat penting dalam organisasi karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan bagaimana hubungan yang akan dilakukan. Batasan komunikasi pelaksana dan penyampaian informasi adalah interaksi manusia, meliputi proses hubungan yang dinamis antara atasan dan bawahan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan mengenai

fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai jenis pekerjaan, dengan tujuan efektifitas dan efesien. Pembahasan mengenai komunikasi berikut ini berkaitan tentang komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru dan penyampaian informasi serta dampak-dampak yang tidak terjalin dengan lancar.

2. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Implementator kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya seperti sumber daya manusiasumber daya finansial. Sasaran tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementator tidak akan berjalan secara maksimal. Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan orang tidak bisa penyediaannya langsung ada dikarenakan menunggu anggaran ditahun depan yaitu tahun 2015 baru memiliki anggaran sendiri dari Pemerintah Kota.

3. Sikap Pelaksana yang Tidak Tegas

Disposisi menyangkut kesiapan dan kesediaan dari para pelaksana atau implementasi dalam menyelesaikan kebijakan, kecakapan pelaksana tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adalah sikap-sikap serta kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan

karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

Disposisi atau karakteristik dapat diartikan sebagai sikap dan kesediaan dari para pelaksana atau implementator dalam menyelesaikan kebijakan, kecakapan pelaksanaan tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Karakteristik yang dimaksud adalah sikap-sikap serta kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektifitas dan efisien, para implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang. Tetapi juga para pelaksana harus memiliki sikap dan kemauan yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku dinas terkait mengenai keberadaan jembatan penyeberangan orang dinilai memiliki karakter kurang tegas dan terlihat tidak mau tau untuk mengambil keputusan terhadap masalah mengenai keberadaan jembatan penyeberangan orang tersebut. Hingga sampai saat ini belum ada tindakan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru. Dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki

berupa jembatan penyeberangan orang di Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal, bahwa keberadaan jembatan penyeberangan sebagai salah satu fasilitas penyeberangan jarang dipakai dan terkadang sering disalah fungsikan

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya dalam hal ini anggaran atau dana yang belum dimiliki oleh Pemerintah Kota, akibat dari keterbatasan anggaran yang dimiliki, Pemerintah Kota melakukan kerja sama oleh pihak ketiga didalam penyediaannya atau pembangunannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan hal-hal sebagai upaya perbaikan baik kepada instansi yang bersangkutan maupun kepada pembuat kebijakan saat ini dan saat yang akan datang:

1. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan atau mengevaluasi kembali kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang, mengingat dengan adanya beberapa keberadaan jembatan penyeberangan orang yang letaknya atau lokasinya tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan fungsinya. Sehingga keberadaannya perlu mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi tata ruang dan keselamatan pengguna jembatan penyeberangan orang.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru sebaiknya lebih memiliki sikap tegas dalam keberadaan jembatan penyeberangan orang

3. Perlu ada sanksi yang tegas terhadap keberadaan jembatan penyeberangan orang yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, Hingga kebijakan mengenai fasilitas pejalan kaki berupa jembatan penyeberangan orang dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

DaftarPustaka

- Budi, Winarto. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- B.N. Marbun, SH. 1979. *Kota Indonesia Masa Depan Masalah dan Prospek*. Jakarta: PT. Erlangga
- Ernan Rustiadi, Susun Saefulhakim, Dyah R. Panuju. 2011. *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonessia
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisi Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Akasara
- William N Dum. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik: Penterjemah Samudra Wibawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Tinov Tiyas, Muchid 2008. *Pedoman Penelitian dan Prosedur ujian Skripsi Unri Fisip*. Pekanbaru. UR Pres